



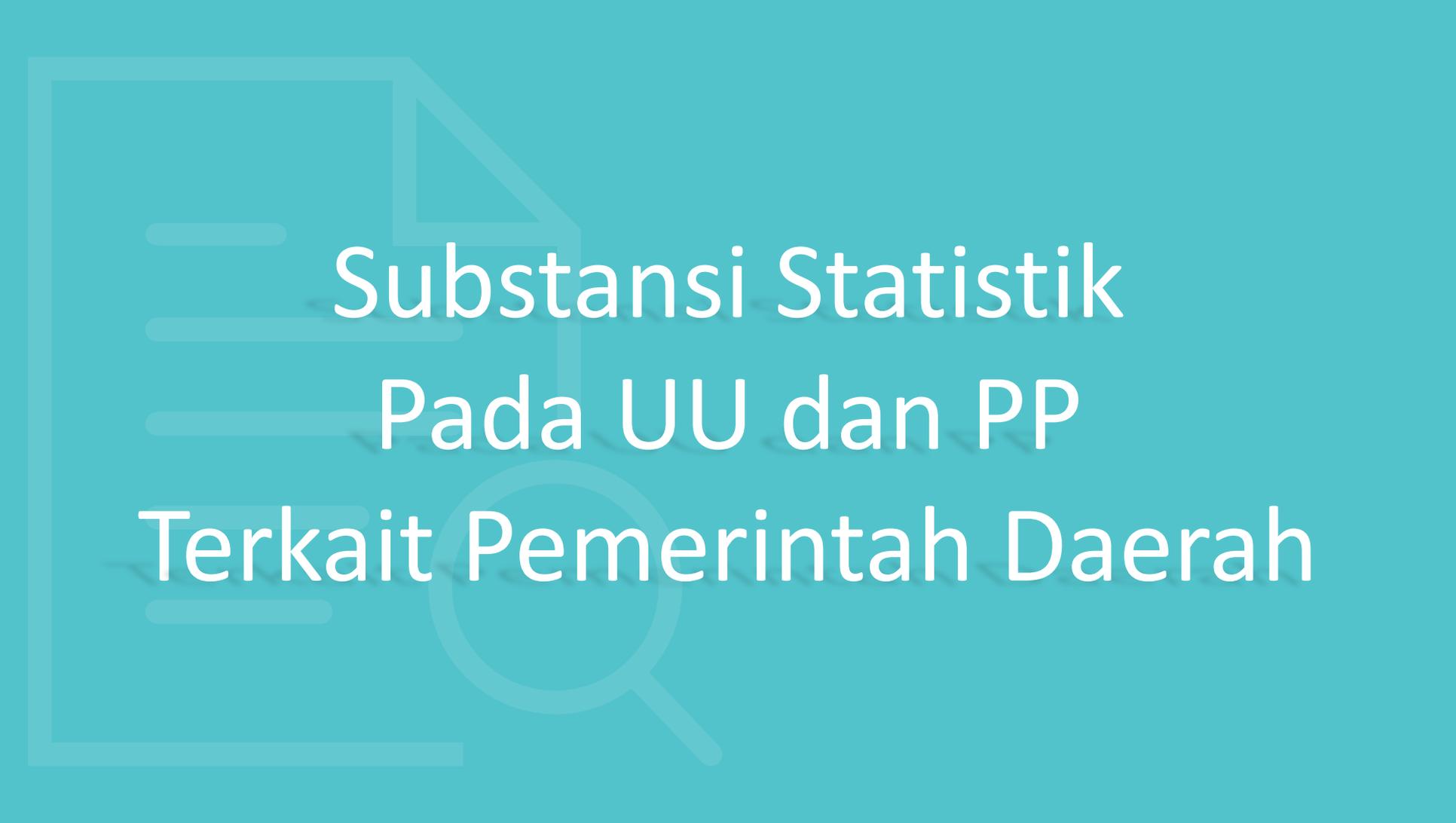
ARAH DAN KEBIJAKAN STATISTIK UNTUK RKPD TA 2020

Hotel Aone, 06 FEBRUARI 2019

Outline

- ✓ Substansi Statistik Pada UU dan PP Terkait Pemerintah Daerah
- ✓ Arah Kebijakan Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah





Substansi Statistik Pada UU dan PP Terkait Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintahan Daerah

PERENCANAAN

- ✓ UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- ✓ UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
- ✓ PP 08/2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- ✓ Permendagri 54/2010 ttg Pelaksanaan PP 08/2008
- ✓ Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemda

PENGANGGARAN

- ✓ UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
- ✓ UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
- ✓ UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
- ✓ PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dg Permendagri 21/2011

Tentang Pemerintahan Daerah

- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
- Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan



UU Nomor
23 Tahun
2014

Tentang Statistik

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik

Asas-asas Pembangunan Nasional

- a. keterpaduan
- b. Keakuratan
- c. kemutakhiran

Kegiatan Statistik Diarahkan Untuk :

- a. Mendukung pembangunan nasional;
- b. Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
- d. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



UU Nomor
16 Tahun
1997

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- A. Statistik Dasar
- B. Statistik Sektoral
- C. Statistik Khusus

Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CARA PENGUMPULAN DATA

- SENSUS
- SURVEI
- KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI
- CARA LAIN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

UU Nomor
16 Tahun
1997



Pembagian Urusan Pemerintah

**UU NO. 23
TAHUN 2014**



DESENTRALISASI



OTONOMI DAERAH



**URUSAN WAJIB
& PILIHAN (Psl**

11)

URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1)

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- d) Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
- e) Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat dan
- f) sosial

URUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2)

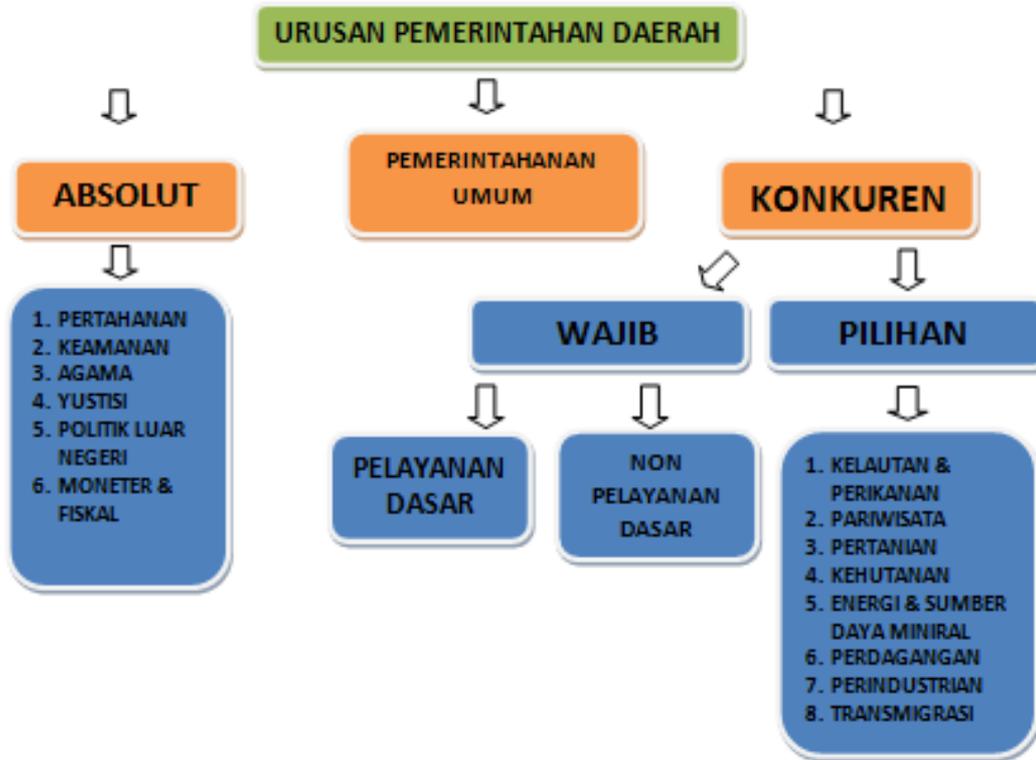
- a) Tenaga Kerja
- b) Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan
- e) Lingkungan Hidup
- f) Administrasi kependudukan & catatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat & Desa
- h) Pengendalian penduduk & keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi & Informatika
- k) Koperasi, usaha kecil & menengah
- l) Penanaman Modal
- m) Kepemudaan & Olah raga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan dan
- r) Kearsipan

URUSAN PILIHAN (psl 12 ayat 3)

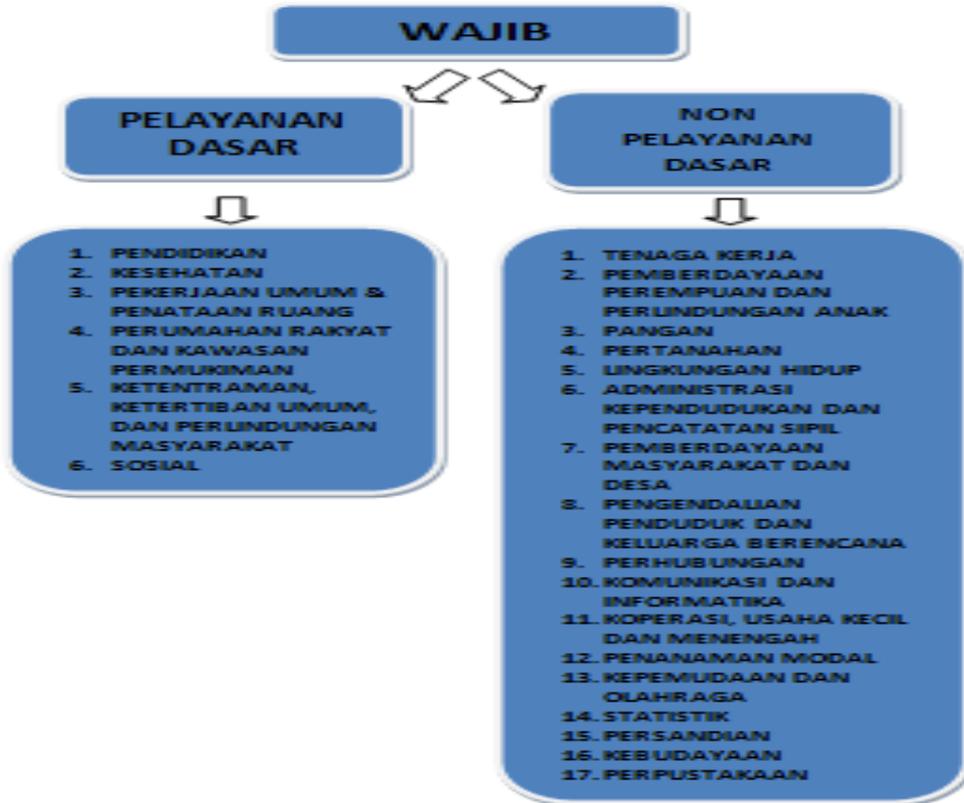
- a) Pertanian
- b) Kehutanan
- c) Energi dan Sumberdaya Mineral
- d) Pariwisata
- e) Kelautan dan Perikanan
- f) Perdagangan
- g) Perindustrian
- h) Transmigrasi



Urusan Pemerintahan Daerah



Urusan Pemerintahan Daerah



Lampiran UU 23 Tahun 2014

T. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Statistik Dasar	Penyelenggaraan statistik dasar	-	-
2	Statistik Sektoral	-	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota

Lampiran PP No 38 Tahun 2007

V. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Statistik Umum	1. Kebijakan	Penetapan pedoman sistem dan prosedur, norma, konsep, definisi, standarisasi, dan ukuran-ukuran.	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi.	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik daerah	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota	
	3. Fasilitasi dan pembinaan	Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik daerah	Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota	

Lampiran PP No 38 Tahun 2007 (cont..)

V. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintahah Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus	Penyelenggaraan statistik dasar meliputi: a. Sensus penduduk (akhiran angka nol) b. Sensus pertanian (akhiran angka tiga) c. Sensus ekonomi (akhiran angka enam)	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi: a. ... b. ... c. ...	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota: a. ... b. ... c. ...
	b. Survei Antar Sensus	survei antar sensus: a. Survei penduduk antar sensus (akhiran angka lima) b. Survei pertanian antar sensus (akhiran angka delapan) c. Sensus ekonomi antar sensus (akhiran angka enam)	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi: a. ... b. ... c. ...	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten/kota: a. ... b. ... c. ...

Lampiran PP No 38 Tahun 2007 (cont..)

V. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Statistik Dasar	c. Survei Berskala Nasional	Penyelenggaraan survei Berskala Nasional: a. Survei-survei bidang ekonomi. b. Survei-survei bidang kesejahteraan rakyat.	Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: a. ... b. ...	Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: a. ... b. ...
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	Penyelenggaraan survei sosial dan ekonomi: a. Survei-survei sosial dan ekonomi lain untuk memperoleh indikator-indikator sosial dan ekonomi.	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: a. ...	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: a. ...
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	1. Penyelenggaraan statistik lintas sektor berskala nasional.	1. —	1. —

Lampiran PP No 38 Tahun 2007 (cont..)

V. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Koordinasi statistik antar sektoral.	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi.	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/ kota.
		2. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota.	2. –	2. –
Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.



KEGIATAN **BPS** PENDUKUNG **PRIORITAS** NASIONAL



Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi landasan menuju satu data kependudukan Indonesia



Sasaran

Publikasi/Laporan Sensus Penduduk



Indikator

Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu



Target

271,4 Juta Jiwa



Lokasi

Seluruh Indonesia



**ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**
Bidang Pembangunan
Manusia



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1997 tentang Statistik



TUJUAN/SASARAN

Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi landasan menuju satu data kependudukan Indonesia

DAFTAR MASUKAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RKPd 2020



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RKPd 2020

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, guna suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020



Sensus Penduduk 2020

Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS akan melaksanakan SENSUS PENDUDUK 2020 dengan fokus pembangunan:
Satu data kependudukan Indonesia

Arah Kebijakan Pelaksanaan Data Statistik Sektorial Pemerintah Daerah



#01 Standar baku data statistik sektoral pemerintah provinsi/kab/kota



#02 Sumber Daya Manusia (Human Resource Development)



#03 Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola

Kelembagaan



Koordinator Data

Bertugas memastikan penerapan asas KSDI (Kelembagaan Satu Data Indonesia) di seluruh K/L/D/I.

- Data Statistik = BPS
- Data Spasial = BIG
- Data lainnya (untuk ditentukan)



Wali Data

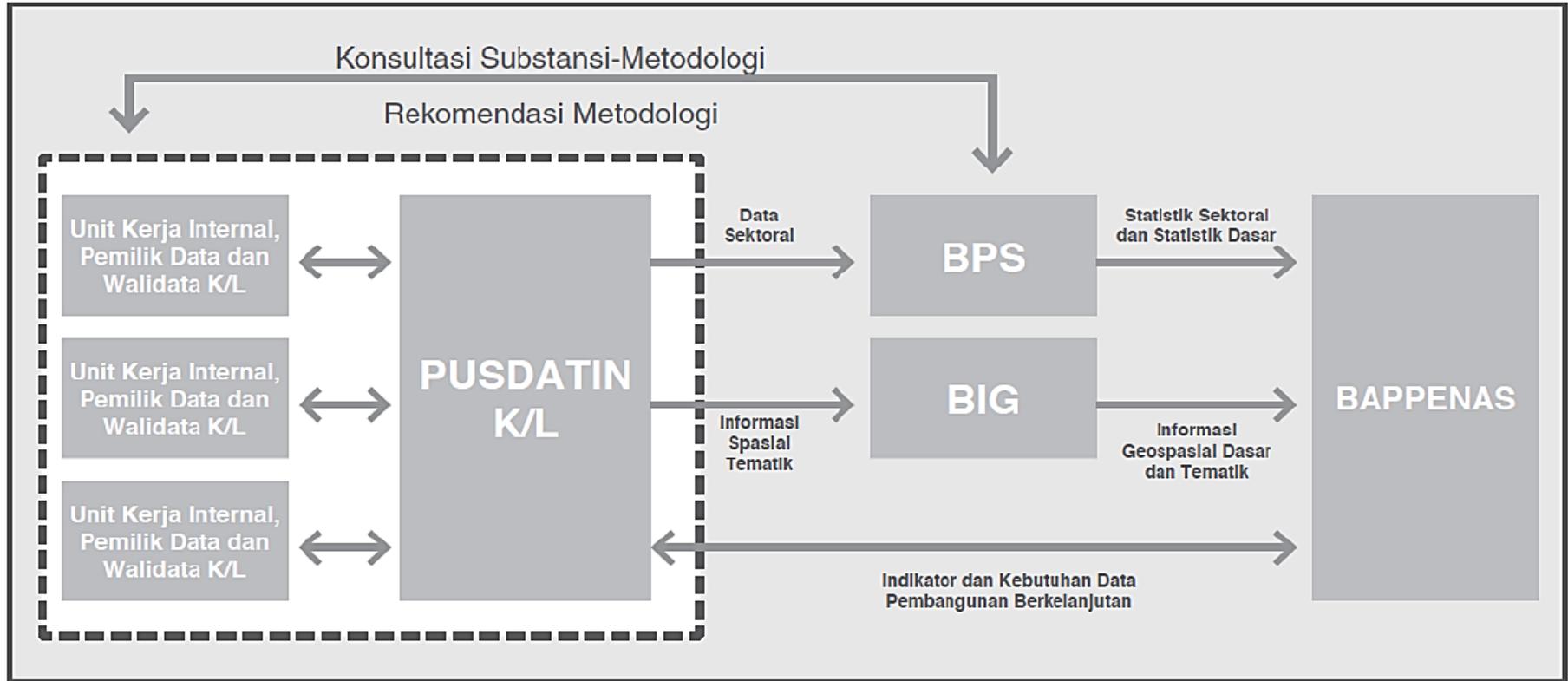
- Menentukan Standar Data dan Metadata untuk Data yang diciptakan bersama Koordinator Data.
- Menciptakan Data.
- Menyampaikan Data ke Unit Data.
- Merespon rekomendasi kebutuhan data dari Unit Data.



Unit Data dan Informasi

- Pengajuan regulasi terkait asas KSDI internal lembaga.
- Menerima data dari walidata.
- Memastikan pemenuhan asas data (standar, metadata, interoperabilitas)
- Menindak lanjuti permintaan data dari masyarakat, unit internal maupun instansi eksternal.
- Berkoordinasi dengan Unit Data lainnya dan Koordinator Data melalui Forum Satu Data.

Aliran Data Statistik dan Spasial



A blurred background image of a business meeting. In the foreground, a person's arm in a grey suit jacket is visible on the right. On the left, there is a glass of water and a pen resting on a document with a bar chart. A large teal circle is centered over the image, containing the text 'Question & Answer' in white. The overall scene is dimly lit, suggesting an indoor office environment.

Question & Answer